

EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPPD) KABUPATEN JOMBANG

(Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang)

Lailatul Mufidah

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
lailamufidah1799@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
Evafanida@unesa.ac.id

Abstrak

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan juga merupakan alat tolak ukur dari keberhasilan pembangunan di suatu daerah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Jombang. Dalam perencanaan pembangunan Bappeda Kabupaten Jombang mengalami beberapa kendala mulai dari sinkronisasi antar renja SKPD dengan capaian visi misi pemerintah daerah melalui indikator kinerja sangatlah lemah, penyusunan renja yang bersifat manual dan pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan sulit dilakukan. Salah satu aspek agar perencanaan pembangunan berhasil dengan terselesaikannya masalah tersebut perlu adanya badan atau satuan kerja yang baik serta adanya sistem informasi yang mendukung. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) merupakan inovasi Bappeda Kabupaten Jombang agar perencanaan pembangunan dapat dikatakan berhasil. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik pengambilan sampel pertimbangan atau sengaja (*purposive sampling*) dimana peneliti mengambil sampel dari 2 instansi yaitu dari Bappeda Kabupaten Jombang dan Kecamatan Mojowarno dengan diwakili beberapa pegawai yang sudah ditentukan peneliti serta satu sampel dari masyarakat umum diwakili oleh beberapa warga Kabupaten Jombang yang dipilih secara acak. Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa SIPPD di Kabupaten Jombang dalam hal keamanan masih kurang hal ini terbukti dengan diretasnya SIPPD sampai putusan Bappeda untuk mengganti SIPPD dengan aplikasi lain selain itu SIPPD juga sering mengalami keterlambatan waktu laporan yang disebabkan SDM yang kurang kompeten, namun pada hasil indikator ketelitian dan variasi laporan SIPPD memiliki hasil yang memuaskan hal tersebut dibuktikan dari desain tampilan SIPPD yang menjadikan hasil akhir laporan yang bisa terspesifikasi secara otomatis dan adanya menu-menu pada tampilan SIPPD yang menjadikan SIPPD mampu memberikan informasi seperti tujuan awal perencanaan pembuatan SIPPD.

Kata Kunci : Efektivitas, Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)

Abstract

Regional development planning is a process of the stages of activities involving various elements of stakeholders in order to utilize and allocate existing resources in order to improve social welfare. Development planning is also a benchmark for the success of development in an area, especially the regional development planning agency (Bappeda) in Jombang Regency. In the development planning of the Jombang district Bappeda, there were several obstacles starting from the synchronization between the work plan of the SKPD and the achievement of the vision and mission of the local government through the performance indicator which was very weak, the preparation of manual work plans and control the development planning is difficult. One aspect for successful development planning with the completion of the problem is the need for a good body or work unit and the existence of a supportive information system. The regional development planning information system (SIPPD) is an innovation of the Jombang district Bappeda so that development planning can be said to be successful. The research is descriptive qualitative with sampling techniques using deliberate sampling techniques (*Purposive sampling*) where

the researchers took samples from 2 agencies, namely from the Bappeda of Jombang and Mojowarno districts by represented by several employees who had been determined by the researchers and one sample from the general public was represented by several residents of Jombang district who were randomly selected. From this study, it was explained that SIPPD in Jombang district on terms of security was still lacking, this was proven by the hacking of SIPPD until the Bappeda's decision of replace SIPPD with other application besides that SIPPD also often experiences delays in reporting time due to less competent HR but the result of the accuracy indicators and variations of the SIPPD report have satisfactory result, as evidenced by the design of the SIPPD which makes the final result of the SIPPD report able to provide information such as the initial purpose of planning SIPPD

Keywords: Effectiveness, Regional development planning information system (SIPPD)

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan tidak lain dari susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan, proses perencanaan merupakan sebuah proses yang dilakukan dalam rangka mencapai sebuah kestabilan, sehingga setiap aktivitas yang ada di dalamnya merupakan usaha yang dilakukan memiliki titik fokus untuk mencapai satu kondisi keseimbangan dalam konteks *problem solving*, *future oriented* dan *resource allocation*. Abe (2001).

Semenjak diberlakukannya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional mekanisme Perencanaan Pembangunan telah dilakukan pemerintah dalam hal ini khususnya Bappeda mengalami beberapa kendala, di antaranya: 1) Sinkronisasi antara renja SKPD dengan capaian Visi Misi Pemerintah Daerah melalui indikator kinerja sangatlah lemah. 2) Penyusunan renja yang bersifat manual, kurang efisien, karena memakan waktu yang relatif lama. 3) Pengendalian terhadap penyusunan perencanaan pembangunan sulit untuk dilakukan. Kendala tersebut juga di alami oleh Pemerintah Kabupaten Jombang mengenai masalah sinkronisasi program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat dengan rencana kerja SKPD, kadangkala masih ditemui berbagai program dan kegiatan yang belum sinkron, kontrol penyusunan perencanaan pembangunan bahkan sampai evaluasi sulit dilakukan.

Untuk mengentaskan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengimplementasikan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Keberadaan SIPPD selaras dengan tujuan *e-government* yakni mencapai kegiatan administrasi yang efektif dan efisien. Implementasi SIPPD ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yakni mengatur tentang pelaksanaan yang

diperlukan untuk menangani masalah strategi pengembangan *e-Government* di lingkungan Pemerintah Indonesia khususnya Kabupaten Jombang. Inpres tersebut menjadi landasan hukum *e-Government* di setiap instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. Namun untuk Bappeda Kabupaten Jombang sendiri terkait undang-undang yang sudah ada baru mengimplementasikan SIPPD tahun 2010 karena kemampuan anggaran maupun kesiapan Kabupaten Jombang dimana hal ini terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang sistem. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Indra selaku pegawai Bappeda Kabupaten Jombang yang mengatakan bahwa: "Terkait Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* dan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional memang sudah ada sejak lama akan tetapi terkait penerapan *e-government* tetap kembali lagi dengan kemampuan anggaran maupun kesiapan Kab/Kota untuk menerapkannya, termasuk Kabupaten Jombang yang baru menerapkan SIPPD tahun 2010 terkait kesiapan SDM dan infrastruktur penunjang sistem".

Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), merupakan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Aplikasi ini disebut dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan para pemangku kepentingan mulai di tingkat kecamatan, SKPD, Bappeda Kabupaten/Kota sampai Bappeda Provinsi Jawa Timur. Melalui perangkat lunak ini diharapkan tersedia Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan, Sistem Informasi Rencana Kerja (Sirenja) yang dapat dioperasikan oleh segenap aparatur di Bappeda dan SKPD lain, terkait dengan proses perencanaan pembangunan.

Pengembangan dan Implementasi SIPPD di Bappeda Kabupaten Jombang dapat dilakukan secara penuh ataupun bertahap sesuai kebutuhan, kondisi dan kesiapan-kesiapan yang ada baik infrastruktur maupun sumber daya manusia. SIPPD dikembangkan dalam model portal/website yang berjalan di internet.

Adapun beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan model portal ini adalah:

- 1) Proses koordinasi dapat dilakukan dengan lebih baik (ada forum koordinasi/komunikasi pada semua pihak yang terlibat, dapat memantau kecamatan, dan SKPD saat melakukan aktifitas pemasukan data).
- 2) Pengendalian data Musrenbang (usulan kecamatan, maupun SKPD) dapat dilakukan lebih baik karena bersifat terpusat.
- 3) Sinkronisasi data dapat dilakukan secara cepat, karena data yang ada adalah bersifat *online*.
- 4) Pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih cepat karena data yang ada adalah bersifat *online*.
- 5) Dapat bekerja sama dengan lebih cepat, karena dapat dilakukan secara bersamaan (*multi-user*).
- 6) Dapat melakukan pemrosesan data dengan lebih leluasa (24 jam sehari selama seminggu, dan dapat dilakukan di mana saja selama ada koneksi internet). (sipdd-jombangkab.go.id/)

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Indra selaku pegawai Bappeda Kabupaten Jombang mengenai keuntungan penggunaan aplikasi SIPPD yang mengatakan bahwa: “Adanya aplikasi SIPPD ini sangat membantu dek selain digunakan sebagai transparansi data dan transparansi kegiatan Bappeda kepada masyarakat, SIPPD ini juga sangat membantu pegawai Bappeda dalam proses pengolahan data yang lebih efektif dan efisien karena aplikasi ini bersifat *online* dan dapat diakses selama 24 jam”.

Inovasi SIPPD dilakukan karena semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pada manajemen organisasi sektor publik khususnya Bappeda Kabupaten Jombang baik dari segi perencanaan, pembangunan maupun mutu pelayanan. Tujuan dari pendirian SIPPD ini juga selain sebagai media transparansi kepada masyarakat juga untuk sinkronisasi data yang lebih cepat terarah karena bersifat *online*. Selain itu juga untuk menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi yang cepat, tepat dan juga untuk menampung keluhan serta klaim masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sekaligus alat kontrol atau umpan balik dari masyarakat.

Keberadaan SIPPD merupakan salah satu upaya memperkecil kerancauan kerja pegawai dengan memberikan akses data yang lebih lengkap dan tertata dalam aplikasi ini, aplikasi SIPPD Kabupaten Jombang ini memiliki *tools* yang berbeda dengan aplikasi SIPPD Kabupaten lain dimana SIPPD ini memiliki *tools* Beranda, Berita, Agenda, Dokumen Perencanaan, Download. Dimana di masing – masing *tools* tersebut memiliki kegunaannya sendiri mulai dari informasi sekilas dari Kabupaten Jombang, Bappeda, berita ter *up-date* dari kegiatan Bappeda, agenda terdekat Bappeda, transparansi kegiatan maupun perencanaan Bappeda hingga data tertentu yang bisa di *download*.

Penerapan SIPPD ini bukan semata-mata dapat diterapkan tanpa ada penghambatnya. Berdasarkan fakta di lapangan, penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) masih saja ditemukan beberapa kendala yang dihadapi dalam menerapkan

aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), baik itu dari segi intern (Bappeda) maupun dari segi ekstern. Dilihat dari segi intern, kendala yang masih dihadapi dalam penerapan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Kabupaten Jombang ialah kualitas dan klasifikasi kompetensi yang dimiliki oleh pemakai sistem. Hingga saat ini, operator-operator Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) di Bappeda, SKPD, Kecamatan dan Desa masih banyak yang belum memiliki kompetensi yang sesuai, hal ini dikarenakan oleh latar pendidikan yang bukan dari programmer (IT), sehingga yang terjadi penggunaan sistem ini tidak berlangsung secara optimal dan juga tingkat kemalasan yang masih tinggi dan tidak mau belajar, karna untuk Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sendiri seringkali mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu juga dengan hadirnya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) ini membuat para pengguna terkesan meremehkan dalam artian mengampangkan suatu pekerjaan, yang akhirnya akan berdampak pada hasil dari pekerjaan yang tidak maksimal, karena input data dilakukan dalam waktu singkat dan tergesa-gesa yang mengakibatkan *integritas* dan *validitas* data masih diragukan kebenarannya.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferdy selaku pegawai Bappeda Kabupaten Jombang mengenai kendala penggunaan aplikasi SIPPD yang mengatakan bahwa: “Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) adalah masalah kompetensi operator system baik itu di Bappeda, SKPD, Kecamatan dan Desa karena rata-rata operator tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan sehingga perlu waktu dalam memberikan pelatihan dan pemahaman program”.

Selanjutnya dilihat dari segi ekstern, kendala yang dihadapi ialah minimnya sosialisasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD). Hingga saat ini, sosialisasi yang dilakukan oleh Bappeda masih terbatas, belum menyeluruh sampai tingkat kecamatan / desa. Minimnya sosialisasi berdampak pada kurangnya pemahaman aplikasi ditingkat bawah (Desa/Kecamatan).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti memilih judul jurnal “Efektivitas Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Jombang (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang).

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori ukuran efektivitas menurut Bodnar dalam Anggraini (2010) menjelaskan indikator efektivitas sistem informasi berbasis teknologi meliputi indikator keamanan data, indikator waktu, indikator ketelitian, indikator variasi laporan/output dan relevansi dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Efektivitas Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Kabupaten Jombang studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis efektivitas sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (sippd) Kabupaten Jombang dengan menggunakan teori ukuran efektivitas menurut Bodnar dalam Anggraini (2010) untuk mengetahui efektivitas SIPPD di Bappeda Kabupaten Jombang. Teori ukuran efektivitas menurut Bodnar dalam Anggraini (2010) ini mencakup lima variabel, antara lain indikator keamanan data, indikator waktu, indikator ketelitian, indikator variasi laporan atau output dan indikator relevansi. Dan berikut ini penjelasannya:

1. Indikator Keamanan data

Keamanan adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau akses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Howard dalam Hasibuan (2016) keamanan sebuah komputer maupun sistem merupakan mutlak diperlakukan dalam membangun sistem seperti halnya dengan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Sistem yang baik harus didukung dengan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan pada sistem. Selain itu sistem yang baik harus mampu melindungi pengguna/user. Oleh karena itu pentingnya keamanan sistem. Semakin baik sistem keamanan sistem, semakin banyak pula user/masyarakat yang akan mengakses. Begitu juga sebaliknya apabila sistem yang kurang melindungi keamanan user, sistem tersebut kurang diminati masyarakat. Selain itu Hasibuan (2016) dalam jurnalnya juga menjelaskan bahwa kemajuan sistem informasi memberikan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia, meski begitu aspek negatif juga banyak, seperti kejahatan komputer atau penyerangan yang berupa penyadapan data di jaringan komputer oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selanjutnya data menurut Imansyah (2003) dapat didefinisikan sebagai nilai (*value*) yang merepresentasikan deskripsi dari suatu obyek atau peristiwa. Data dalam hal ini bisa dibentuk dari data mentah yang berupa angka, karakter, gambar atau bentuk lainnya. Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa suatu yang punya makna. Berhubungan dengan definisi keamanan dan data diatas Stephens dan Plew dalam Marbun (2015) menjelaskan bahwa pengamanan data adalah sebuah basis data yang dapat diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data. Marbun (2015) dalam jurnalnya juga

menjelaskan bahwa dengan basis data, pengguna sistem dapat menyimpan data secara terorganisir dan aman

Implementasi keamanan SIPPD di Bappeda Kabupaten Jombang dirancang sedemikian rupa agar keamanan data pada SIPPD terjamin, dengan adanya SIPPD juga diharap mampu melindungi data yang tersimpan dalam aplikasi SIPPD. Keamanan data SIPPD dirancang dengan teliti agar keamanan data teruji dengan memasukan user dan login password sebelum mengakses beberapa menu yang ada pada SIPPD. Selain itu tidak semua orang dapat mengakses keseluruhan data karena hanya pihak dari Bappeda dan kecamatan yang bisa secara leluasa mengakses SIPPD, hal tersebut juga dikarenakan username dan password yang dibuat sendiri oleh pihak Bappeda. Sehingga pada aplikasi SIPPD ini masyarakat umum hanya bisa melihat hasil olahan data dari Bappeda yang di tampilkan pada aplikasi SIPPD.

Implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) khususnya dalam hal keamanan sangat diperhatikan melihat keseriusan Bappeda dalam merancang SIPPD mendisainnya login password sebelum masuk pada menu tertentu seperti pada menu Musrenbang. Akan tetapi meski didesain agar keamanan data terpercaya pada tahun 2017 aplikasi SIPPD diretas dan tidak dapat dapat dibuka. Hal yang sama terulang kembali di awal tahun 2018 yang kemudian oleh Bappeda Kabupaten Jombang SIPPD tidak lagi digunakan.

Upaya dari Bappeda dalam membangun sistem benar-benar dibuat dengan persiapan yang begitu matang dengan melalui tahapan-tahapan dan percobaan. Hal itu terlihat dari hasil studi banding dengan daerah lain tentang pelaksanaan sistem perencanaan daerah yang berbasis *web*. Sehingga Bappeda dapat membangun sistem perencanaan daerah dengan ciri khas sendiri. Meskipun dalam implementasinya aplikasi SIPPD ini pernah diretas oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu dilihat dari pengoprasian SIPPD sendiri dari awal sudah menunjukkan keseriusan dalam hal keamanan data namun pada implementasinya keamanan data ini masi saja bisa diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan pihak Bappeda masih belum siap dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia(SDM) terutama pada bidang IT, sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut Bappeda hanya bisa menghubungi pihak ke-3 yang membuat aplikasi SIPPD. Sedangkan dalam ulasan mengenai keamanan data diatas menjelaskan pentingnya keamanan suatu sistem khususnya keamanan data yang dikelola atau ada didalam sistem. Jika keamanan data tersebut bermasalah maka data yang ada didalam dikhawatirkan akan ikut bermasalah. Sehingga dalam indikator keamanan data ini SIPPD masih kurang.

2. Indikator Waktu

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penting bagi instansi penyelenggara untuk memberikan pelayanan publik berdasarkan kurun waktu yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena adanya kurun waktu yang ditetapkan

berguna sebagai jaminan kepastian bagi penerima pelayanan. Sehingga masyarakat tidak kecewa terhadap instansi terkait. Pelayanan dengan waktu yang tepat menurut Hardiansyah (2011) sebagai pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Dengan adanya SIPPD diharap masalah waktu bisa terselesaikan karena kerja pegawai dapat dipermudah.

Adanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, pemrosesan data dapat dilakukan dengan lebih cepat karena data yang ada adalah bersifat online terutama saat kegiatan Musrenbang. Dengan adanya SIPPD khususnya halaman mengenai musrenbang Bappeda dan kecamatan dimudahkan dalam memangkas waktu ketika musrenbang. Hal ini dikarenakan dalam implementasinya pihak kecamatan untuk memberikan usulan kegiatan, laporan tidak perlu menulis secara manual tinggal *login* SIPPD masuk bagan aplikasi musrenbang dan mengisi semua laporan dibagian tersebut. Selain dapat bekerja dengan lebih cepat karena bersifat *online* SIPPD juga membantu kerja pegawai dengan efektif dan efisien karena dapat dilakukan secara bersamaan (*multi-user*).

Selain itu juga pihak Bappeda sendiri juga dimudahkan karena dengan desain pengelolaan data yang dikelompok-kelompokkan sesuai SKPD, lokasi kegiatan dan bidang kegiatan. Dan dengan begitu usulan usulan yang masuk bisa terspesifikasi dengan sendirinya pada halaman daftar usulan data. Adanya menu mulai nama kegiatan, lokasi kegiatan bahkan *output* atau keluaran dari usulan kegiatan, menu rancangan anggaran dana yang diperlukan untuk usulan kegiatan dari kecamatan. Selain itu juga terdapat penggolongan bidang dan program usulan kegiatan sehingga Bappeda tidak sulit lagi dalam melihat laporan hasil akhir keseluruhan daripada usulan kegiatan dari kecamatan yang ada dan Bappeda dapat meringkas waktu dalam kegiatan musrenbang.

Selain pemrosesan data dapat dilakukan dengan cepat ada banyak kelebihan daripada SIPPD yang dapat mempermudah pengguna dalam efisiensi waktu pengerjaan *input* data maupun laporan, salah satunya dikarenakan adanya sistem yang dirancang agar bisa diakses selama 24 jam dengan sistem yang bisa diakses selama 24 jam hal ini sangat membantu pegawai Bappeda dan kecamatan karena dengan begitu pegawai juga bisa mengakses SIPPD dimana saja dan bahkan dirumah selagi terkoneksi dengan *internet*

Pada implementasinya meski *desain* dari SIPPD sudah dibuat sedemikian agar mempermudah kinerja pegawai hal ini bertolak belakang dengan apa yang terjadi bagi pegawai kecamatan, karena sama dengan apa yang terjadi pada Bappeda SDM masih menjadi hambatan tersendiri bagi implementasi SIPPD. Pada tingkat kecamatan masih banyak SDM yang belum memadai terutama SDM dibidang IT sehingga dalam mengakses SIPPD mereka menunggu operator yang biasanya *menghandle* SIPPD tersebut, dan apabila operator tersebut ada urusan kantor lain atau diluar kantor SDM lain tidak dapat mengaksesnya oleh karena itu pihak kecamatan menggunakan cara manual seperti

menulis dikertas selagi menunggu operator yang *menghandle* tersebut kembali. Karena adanya keterlambatan input data tersebut menjadikan efisiensi waktu yang kurang mengakibatkan pelaporan data terlambat maka pengerjaan yang ditetapkan dengan waktu kurun waktu tertentu tidak akan terlaksana dan menjadikan tidak tepatnya pelaporan maupun output yang tidak sesuai harapan.

3. Indikator Ketelitian

Menurut Bodnar dalam Anggraini (2010) menjelaskan bahwa ketelitian berhubungan dengan tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran informasi dan pada volume data besar biasanya meliputi dua jenis kesalahan, yakni kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Pada implementasi SIPPD tidak menutup kemungkinan jenis kesalahan tersebut terjadi dikarenakan cakupan wilayah Bappeda sendiri yang mengelola data perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jombang hal tersebut terbukti dari isi aplikasi SIPPD yang sebagian besar mengenai perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang. Selain itu kesalahan pencatatan maupun penghitungan seringkali terjadi kesalahan apalagi jika menggunakan cara manual dengan adanya SIPPD sesuai dengan salah satu tujuan SIPPD untuk mewujudkan pengelolaan data berbasis web diharap mampu menekan kesalahan tersebut menggunakan aplikasi SIPPD karena SIPPD yang didesain sedemikian rupa seperti adanya penggolongan bidang usulan kegiatan, SKPD, usulan dana, tahun anggaran yang mana menu menu tersebut akan membantu sistem dalam mengelola data akhir yang lebih spesifik.

Pada implementasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) sitem dikembangkan dengan model *time-frame process*, yakni proses Musrenbang dari awal sampai akhir disajikan dalam bagan proses berdasarkan waktu. Dengan model ini setiap pengguna sistem, akan tahu posisinya sekarang di mana dan harus mengerjakan apa. Dengan model ini juga, sejarah perubahan data akan tetap terjaga dari waktu ke waktu. Materi yang didukung, tidak hanya terbatas data-data tabel program dan kegiatan, tetapi juga mendukung data-data.

Selain tampilan yang di desain agar mempermudah dalam *input* data, SIPPD sendiri juga di *desain* agar data yang masuk secara otomatis dapat dikoreksi langsung oleh sistem. Dimana sistem ini memang dibuat sedemikian rupa untuk memperbaiki *human error* pada saat *input* data. SDM sendiri dari awal seringkali menjadi sorotan dalam implementasi SIPPD ini, karena seringkali terjadi kesalahan berawal dari SDM yang kurang mumpuni/siap. Sehingga Bappeda sendiri disini sudah menyadari hal tersebut dengan mengantisipasi *human error* tersebut dengan mendesain SIPPD secara otomatis akan mengkoreksi kekeliruan dalam *input* data.

Dalam implementasi suatu aplikasi tidak dipungkiri ketelitian adalah faktor yang sangat penting. Dari desain SIPPD sendiri dibuat sedemikian rupa agar dalam pengelolaan data sampai hasilnya bisa lebih teliti.

Begitupula dalam pengelolaan usulan kegiatan musrenbang dalam SIPPD ini dibuat dalam input datannya terdapat beberapakolom yang harus diisi oleh operator dimana kegunaan pengisian tersebut untuk hasil laporan yang akan disimpan atau dicetak akan terspesifikasi sesuai SDKP, Bidang, dan bahkan lokasi sehingga memudahkan Bappeda dalam melihat isi/ hasil laporan final.

Dari ulasan teori dan hasil wawancara berkesinambungan dikarenakan desain aplikasi SIPPD yang didesain sedemikian rupa seperti adanya menu penggolongan bidang, SKPD, program, usulan dana, tempat lokasi agar operator yang mengakses SIPPD lebih teliti saat mengelola data sehingga hasil dari data akhir keluaran SIPPD yang terspesifikasi tersendiri dan memudahkan siapapun untuk memperoleh informasi.

4. Indikator Variasi Laporan/Output

Sistem dikatakan efektif jika sistem mempunyai tingkat kemampuan untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi atau masyarakat. Menurut Bodnar dalam Anggraini (2010) menjelaskan bahwa variasi laporan berhubungan dengan kelengkapan isi informasi, hal ini tidak hanya mengenai volumenya tapi juga mengenai informasi. Berdasarkan hasil penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di Bappeda, adanya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana materi yang ada dalam portal tidak hanya bersifat substansi perencanaan pembangunan daerah yaitu sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan pembangunan, akan tetapi juga terdapat materi yang bersifat koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* yang ada. Dengan adanya fasilitas tersebut, pada umumnya sangat membantu dalam proses Musrenbang RKPD.

Dalam implementasi SIPPD sendiri diharapkan adanya *output* yang positif bagi pengguna baik itu pegawai Bappeda, kecamatan maupun masyarakat. Agar semua itu terealisasi aplikasi ini dibuat sedemikian rupa mulai dari desain aplikasi itu sendiri, kegunaan diharapkan bisa membantu untuk komunikasi tersendiri antara *stakeholder* dan pengguna.

Dari implementasi SIPPD dilihat bahwa ada menu Beranda, Berita, Agenda, Dokumen Perencanaan, Download dimana menu tersebut dapat dilihat oleh masyarakat umum sebagai salah satu tujuan daripada SIPPD untuk transparansi data dan kegiatan Bappeda. Hal lain juga bisa digunakan oleh pihak kecamatan untuk mengakses memasukkan data musrenbang dll dengan *login* dan memasukkan *password* terlebih dahulu sebelum *input* data. Dari menu tersebut juga bisa dilihat adanya kolom aspirasi dimana kolom tersebut sebagai salah satu cara bagi Bappeda untuk berkomunikasi dengan masyarakat melalui saran dan komentar masyarakat yang akan disaring dan bahkan akan menjadi pertimbangan dalam hal pembangunan Kabupaten Jombang.

Selain sebagai alat komunikasi Bappeda dengan masyarakat SIPPD juga mempermudah pelaporan

informasi data bagi kecamatan ke Bappeda begitupula sebaliknya. Dari implementasi SIPPD dapat dilihat adanya menu daftar pelaporan Kabupaten Jombang terdapat pilihan kecamatan disini pihak Bappeda lebih memudahkan dalam mengakses informasi mengenai pelaporan data, dimana dalam pengoprasiannya operator tinggal mengetik pelaporan kecamatan mana yang dibutuhkan maka secara otomatis pelaporan yang dimaksud akan muncul. Selain itu pelaporan juga bisa dicetak maupun di *download* berupa *pdf*. Dengan demikian dapat dilihat bahwa SIPPD sendiri dalam implementasinya mampu menjadi alat untuk komunikasi antar kecamatan dan masyarakat oleh pemerintah Kabupaten Jombang terkhususnya Bappeda.

Pada implementasi aplikasi SIPPD dari beberapa ulasan diatas menjelaskan bahwa variasi laporan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh Bappeda seperti yang tercantum dalam tujuan awal SIPPD untuk memberikan informasi mengenai transparansi data maupun kegiatan Pemerintah Kabupaten Jombang khususnya Bappeda kepada masyarakat. Selain itu juga SIPPD mampu memberikan informasi data yang akurat mengenai usulan kegiatan Musrenbang, KPU PPAS kepada kecamatan-Bappeda maupun Bappeda-kecamatan dengan cepat tanpa harus bertatap muka

5. Indikator Relevansi

Suatu sistem dapat dikatakan efektif apabila sistem tersebut dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan hasil yang nyata kepada masyarakat sebagaimana yang diungkapkan Bodnar dan Anggraini (2010) menjelaskan bahwa relevansi yang menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi, baik dalam analisis data, pelayanan maupun penyajian data. Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai bukti nyata manfaat dari SIPPD diantaranya adalah sistem SIPPD mampu menjamin masyarakat untuk mendapatkan layanan informasi yang cepat, tepat dan juga diberikan sekaligus alat kontrol atau umpan balik dari masyarakat.

Dalam awal perencanaan pembuatan SIPPD sebenarnya Bappeda Kabupaten Jombang sudah membuat, merancang sedemikian rupa dengan tujuan SIPPD sebagai tolak ukur keberhasilan daripada SIPPD ini. Seperti salah satunya tujuan adanya SIPPD untuk menjamin masyarakat mendapatkan layanan informasi yang cepat, tepat dan juga menampung keluhan serta klaim masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan sekaligus alat kontrol atau umpan balik dari masyarakat, dimana tujuan tersebut dalam implementasinya masih belum berjalan karena untuk mencapai semua tujuan tersebut masyarakat harusnya lebih dulu mengerti tentang SIPPD. Sedangkan dalam beberapakali hasil wawancara peneliti dengan narasumber masyarakat umum seringkali menemukan bahwa masyarakat kebanyakan masih belum tau/mengerti tentang SIPPD, adapun yang mengerti hanya pada lingkaran Bappeda dan kecamatan sendiri seperti yang pernah disampaikan oleh salah satu narasumber yang peneliti wawancarai.

Selain itu juga pada dasarnya kolom aspirasi pada SIPPD meski dibuka untuk masukan dari masyarakat umum mengenai program atau kegiatan Bappeda memang banyak usulan dan komentar yang ada namun sebagian besar masyarakat Kabupaten Jombang masih belum mengaksesnya. Sedangkan untuk masyarakat umum tujuan daripada SIPPD sendiri sebagai alat komunikasi serta transparansi data dan kegiatan Bappeda dimana harapan dari transparansi tersebut ada *output* dari masyarakat kepada Bappeda.

Terlepas dari kurangnya pengetahuan masyarakat Kabupaten Jombang mengenai SIPPD implementasi aplikasi SIPPD di Kabupaten Jombang terutama mengenai produk/keluaran informasi yang dirasa sudah mewakili Bappeda Kabupaten Jombang untuk transparansi data maupu kegiatan Bappeda dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Jombang, analisis data dikarenakan aplikasi SIPPD yang didesain sedemikian rupa agar data yang tersaji mudah untuk dimengerti, pelayanan dikarenakan dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembnagunan di Daerah Kabupaten Jombang kegiatan musrenbang lebih tepat waktu dan penyajian data yang unik karna trmuat dalam aplikasi SIPPD yang bersifat online dan bisa diakses selama 24 jam dengan dukungan wifi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang program SIPPD yang telah dijalankan di Bappeda Kabupaten Jombang dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan program SIPPD di Kabupaten Jombang sendiri sudah baik mulai dari tahap perencanaan sampai pembuatannya namun pada tahap implementasi dirasa masih terdapat beberapa kendala baik dari Bappeda Kabupaten Jombang sendiri maupun Kecamatan. Dimana seringkali kendala yang muncul berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), SDM menjadi hambatan tersendiri dalam implementasi SIPPD karena SDM merupakan faktor paling penting untuk mengakses SIPPD. Meskipun tujuan lain daripada SIPPD sudah berjalan seperti mempermudah kerja pegawai dari aspek waktu, ketelitian data dan variasi laporan namun pada aspek keamanan data dan relavansi masih kurang karena dengan adanya kendala SDM dibidang IT yang belum memadai menjadikan SIPPD pernah diretas oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan tujuan transparansi data/kegiatan Bappeda belum diterima secara penuh oleh masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya SIPPD oleh karenanya efektivitas sistem informasi perencanaan pembangunan daerah masih kurang.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terhadap efektivitas sistem informasi perencanaan pembangunan daerah (sippd) Kabupaten yaitu sebagai berikut:

1. Setiap instansi terkait diharapkan bekerja sama dan koordinasi untuk perkembangan SIPPD di Kabupaten Jombang.
2. Kegiatan sosialisasi mengenai aplikasi SIPPD lebih diperbanyak agar masyarakat khususnya warga Kabupaten Jombang mengetahui adanya aplikasi SIPPD.
3. Lebih diperbanyak pelatihan atau pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Bappeda maupun Kecamatan mengenai IT
4. Lebih diperhatikan tujuan awal dari perencanaan pembuatan SIPPD sebagai tolak ukur keberhasilan sistem.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP. selaku dosen pembimbing
- c. Fitrotun Niswah, S.AP, M.AP. dan Galih Wahyu Pradana a, S.AP., M.Si selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander Abe, 2001. *Perencanaan Daerah Memperkuat Prakarsa Rakyat Dalam Otonomi Daerah*. Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Anggraini, Dini (2010) *Efektivitas Informasi Pelaporan Berkinerja (SIP-B) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Unikom
- Bodnar, George H., William S. Hopwood. (2000). *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi keenam, Terjemahan Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan. Jakarta: Salemba Empat.
- Bodnar dalam Anggraini (2010). *Efektivitas informasi Pelaporan Berkinerja (SIP-B) Anggaran Pendapatan Belanja Dareah (APBD) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat*. Jurnal Unikom
- Darsono & Siswandoko, Tjatjuk. 2011. *Sumber Daya Manusia Abad 21*. Nusantara Consulting: Jakarta.
- Hasibuan, Muhammad Siddik. 2016. *Keyloger Pada Aspek Keamanan Komputer*. .Jurnal Teknovasi.
- Indrajit, Richardus Eko (2004). *E-Government Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta:Andi Offset.

- Marbun, Murni. 2015. *Implementasi Sistem Pengamanan Data Barang Pada PT. Matahari Putra Prima*. Jurnal Penusa
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sippd.jombangkab.go.id di akses tanggal 16 Agustus 2015